

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD KEMANTREN MANTRIJEKON**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**Bab I**  
**Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD**
- 1.1.1 Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**
- Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode Semester I tahun 2023; dan
  - Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 1.1.2 Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**
- Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
  - Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Semester I Tahun Anggaran 2023.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**
- Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
  - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
  - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 1.3 Sistematisasi penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD**
- Sistematisasi penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
- BAB I PENDAHULUAN**  
 Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematisasi penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
 Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**  
 Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**  
 Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.
- BAB V PENUTUP**  
 Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**Bab II**  
**Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**
- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	27.000.000.00	33.045.000.00	122.39
BELANJA	11.028.540.578.00	10.721.921.148.00	97.22
Surplus (defisit)	(11.001.540.578.00)	(10.688.876.148.00)	97.16

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	15,765,000.00	33,045,000.00	209.61
BELANJA	9,718,365,629.00	10,721,921,148.00	110.33
Surplus (defisit)	(9,702,600,629.00)	(10,688,876,148.00)	110.17

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp 33.045.000,00 atau 122,39% dari target sebesar Rp 27.000.000,00 naik dibanding realisasi Tahun 2022, dikarenakan pembayaran rutin Perpanjangan Penggunaan Izin Pemakaman sesuai dengan jatuh tempo di tahun 2023.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.721.921.148,00 atau 97,16% dari target sebesar Rp 11.028.540.578,00

#### 2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Retribusi Daerah sebesar 122,39%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 33.045.000,00 Naik dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 15.765.000,00 Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	122.39	
	Pajak Daerah	-	-		
	Retribusi Daerah	27,000,000.00	33,045,000.00		
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-		
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>33,045,000.00</b>	<b>122.39</b>	

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	210.81
	Pajak Daerah	-	-	
	Retribusi Daerah	15,675,000.00	33,045,000.00	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>15,675,000.00</b>	<b>33,045,000.00</b>	

#### 2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 93,37%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.992.075.148,00

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 6,63%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 729.846.000,00 atau sebesar 99,80% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 731.344.000,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi (%)
1	Belanja Operasi	10,297,196,578.00	9,992,075,148.00	97.04	93.37
	Belanja Pegawai	5,220,660,000.00	4,957,456,704.00	94.96	
	Belanja Barang dan Jasa	4,187,936,578.00	4,161,569,444.00	99.37	
	Belanja Hibah	888,600,000.00	873,049,000.00	98.25	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
2	Belanja Modal	731,344,000.00	729,846,000.00	99.80	6.63
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	192,027,000.00	192,027,000.00	100.00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	539,317,000.00	537,819,000.00	99.72	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11,028,540,578.00</b>	<b>10,721,921,148.00</b>	<b>97.22</b>	

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	Semester I 2023	(%)
1	Belanja Operasi	8,216,303,479.00	9,992,075,148.00	121.61
	Belanja Pegawai	4,869,641,526.00	4,957,456,704.00	
	Belanja Barang dan Jasa	3,346,661,953.00	4,161,569,444.00	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
2	Belanja Modal	1,502,062,150.00	729,846,000.00	48.59
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	334,997,150.00	192,027,000.00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	548,031,000.00	537,819,000.00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	619,034,000.00	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9,718,365,629.00</b>	<b>10,721,921,148.00</b>	



Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	100.00	0.91
	Gelar Budaya Jogja	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,643,164,466.00</b>	<b>6,366,885,556.00</b>	95.84	60.24
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,588,000.00	3,583,000.00	99.86	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,656,000.00	1,654,000.00	99.88	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	690,000.00	690,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	690,000.00	690,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,670,000.00	6,658,000.00	99.82	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,220,660,000.00	4,937,456,704.00	94.96	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,898,000.00	2,894,000.00	99.86	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,242,000.00	1,242,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,898,000.00	2,891,000.00	99.76	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,242,000.00	1,239,000.00	99.76	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,035,000.00	1,035,000.00	100.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	690,000.00	690,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	690,000.00	690,000.00	100.00	
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1,035,000.00	1,035,000.00	100.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	690,000.00	690,000.00	100.00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	690,000.00	690,000.00	100.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasaan	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,680,000.00	3,680,000.00	100.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,417,100.00	9,403,600.00	99.86	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,286,276.00	66,218,275.00	99.90	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,687,800.00	11,686,200.00	99.99	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,406,250.00	27,792,800.00	97.84	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,850,000.00	85,729,000.00	99.86	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192,027,000.00	192,027,000.00	100.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,650,000.00	2,558,000.00	96.53	
	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	77,160,000.00	77,029,602.00	99.83	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umam Kantor	507,501,000.00	506,032,400.00	99.71	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,900,000.00	24,121,670.00	89.67	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanasan	83,103,000.00	77,150,465.00	92.84	
	Pemeliharaan Mebel	9,725,000.00	9,725,000.00	100.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,830,000.00	54,360,000.00	99.14	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228,965,040.00	227,631,840.00	99.42	
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>463,840,925.00</b>	<b>463,580,325.00</b>	99.94	4.21
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	375,431,300.00	375,171,300.00	99.95	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12,001,000.00	12,001,000.00	100.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	76,408,625.00	76,408,025.00	99.99	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3,696,897,187.00</b>	<b>3,667,279,267.00</b>	99.20	33.52
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	251,370,400.00	251,370,400.00	100.00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37,640,000.00	37,640,000.00	100.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,079,126,000.00	1,063,478,000.00	98.55	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2,080,954,787.00	2,067,445,787.00	99.35	
	Evaluasi Kelurahan	30,980,000.00	30,846,000.00	99.57	
	Penyelenggaraan Lembaga Komasyarakatan	36,827,000.00	36,505,000.00	99.13	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	55,570,000.00	55,570,000.00	100.00	
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11,745,000.00	11,745,000.00	100.00	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	53,860,000.00	53,860,000.00	100.00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	31,809,000.00	31,804,080.00	99.98	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20,115,000.00	20,115,000.00	100.00	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76,253,000.00	75,906,000.00	99.54	0.69
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	76,253,000.00	75,906,000.00	99.54	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48,385,000.00	48,270,000.00	99.76	0.44
	Fasilitasi/Koordinasi dan Pembinaan (Bintek/Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	18,800,000.00	18,685,000.00	99.39	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29,585,000.00	29,585,000.00	100.00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11,028,540,578.00</b>	<b>10,721,921,148.00</b>	<b>97.22</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Urainn	2022	2023	(%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	100,000,000.00	-
	Gelar Budaya Jogja	-	100,000,000.00	-
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,126,418,922.00	6,366,885,556.00	103.93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,680,000.00	3,583,000.00	97.36
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1,654,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1,150,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,032,000.00	690,000.00	13.71
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	690,000.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,097,500.00	6,658,000.00	73.18
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000.00	1,380,000.00	92.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,869,641,526.00	4,957,456,704.00	101.80
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,955,000.00	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,599,500.00	1,380,000.00	86.28
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,239,000.00	2,894,000.00	89.35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,500,000.00	1,242,000.00	82.80
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,500,000.00	1,242,000.00	82.80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,239,600.00	2,891,000.00	89.24
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,500,000.00	1,239,000.00	82.60
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1,035,000.00	-
	Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD	-	690,000.00	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	690,000.00	-
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1,035,000.00	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1,380,000.00	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	690,000.00	-
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	690,000.00	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepogawisan	-	1,380,000.00	-
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	3,680,000.00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,360,300.00	9,403,600.00	90.77
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,935,008.00	66,218,275.00	84.97
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	11,686,200.00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	30,306,250.00	27,792,800.00	91.71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,193,000.00	85,729,000.00	120.42
	Pengadaan Mebel	102,784,000.00	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202,813,150.00	192,027,000.00	94.68
	Penyediaan Jasa Surat Mesvurat	4,208,300.00	2,558,000.00	60.78
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	58,647,833.00	77,029,602.00	131.34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497,527,082.00	506,032,400.00	101.75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,316,163.00	24,121,670.00	28.95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	77,150,465.00	-
	Pemeliharaan Mebel	-	9,725,000.00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,975,000.00	54,360,000.00	201.52
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56,968,708.00	227,631,840.00	405.99
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	339,501,689.00	463,580,325.00	136.55
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	132,523,925.00	375,171,300.00	245.98
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6,110,000.00	12,001,000.00	196.42
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	66,297,764.00	76,408,025.00	115.25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	114,570,000.00	-	-



4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,149,276,268.00	3,667,279,267.00	116.45
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115,552,000.00	251,370,400.00	217.54
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	37,640,000.00	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,344,368,500.00	1,063,478,000.00	79.11
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,689,355,768.00	2,067,445,787.00	122.38
	Evaluasi Kelurahan	-	30,846,000.00	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	36,505,000.00	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	55,570,000.00	-
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	6,900,000.00	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	11,745,000.00	-
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Sains	-	53,860,000.00	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	31,804,080.00	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	20,113,000.00	-
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103,168,750.00	75,906,000.00	73.57
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	40,803,400.00	-	-
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	62,365,350.00	75,906,000.00	121.71
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	48,270,000.00	-
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Binlitik/Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	-	18,685,000.00	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	29,585,000.00	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9,718,365,629.00</b>	<b>10,721,921,148.00</b>	<b>110.33</b>

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan  
Tidak ada

**Bab III**  
**Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurusan serta Pembakaran/Penguburan Mayat	33,045,000.00	15,765,000.00

Penjelasan :

Retribusi Izin Pemakaman tercapai 122,39% dari target pencermatan. Retribusi Izin Pemakaman dikarenakan sesuai dengan pembayaran rutin Perpanjangan Penggunaan Izin Pemakaman yang jatuh tempo di tahun 2023.

3.2	Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10,721,921,148.00</b>	<b>9,718,365,629.00</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9,992,075,148.00</b>	<b>8,216,303,479.00</b>
	Belanja Pegawai	4,957,456,704.00	4,869,641,526.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,366,372,038.00	2,340,978,725.00
	Belanja Tambahan Penhasilan ASN	2,591,084,666.00	2,528,662,801.00
	Belanja Barang dan Jasa	4,161,569,444.00	3,346,661,953.00
	Belanja Barang	1,607,939,722.00	1,252,326,846.00
	Belanja Jasa	2,333,262,742.00	1,883,192,507.00
	Belanja Pemeliharaan	98,606,980.00	121,617,600.00
	Belanja Perjalanan Dinas	112,110,000.00	89,525,000.00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7,650,000.00	-
	Belanja Hibah	873,049,000.00	-
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sekarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	873,049,000.00	-
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>729,846,000.00</b>	<b>1,502,062,150.00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192,027,000.00	334,997,150.00
	Belanja Modal Alat Besar	2,500,000.00	-
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47,527,000.00	175,435,150.00
	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	20,000,000.00	-
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
	Belanja Modal Komputer	118,500,000.00	144,562,000.00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3,500,000.00	-
	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	15,000,000.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	537,819,000.00	548,031,000.00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	595,313,000.00	241,309,000.00
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	142,506,000.00	306,722,000.00
	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	-	619,034,000.00
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	438,048,000.00
	Belanja Modal Bangunan Air	-	58,784,000.00
	Belanja Modal Instalasi	-	122,792,000.00

Penjelasan :

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp 10.721.921.148,00 dari anggaran Tahun 2023 Sebesar Rp11.028.540.578,00 atau sebesar 97,22% dari target. Belanja Pegawai masih dibawah 95% dikarenakan ada pegawai yang pensiun, ada pegawai yang lebas tunjangan keluarga dikarenakan anaknya sudah lulus kuliah, Gaji dan TPP CPNS masih dibayarkan sebesar 80% hingga bulan Juli 2023 dan mulai 100% pada bulan Agustus 2023. Untuk Belanja yang lain sesuai dengan pelaksanaan tatakala, dan evaluasi berkala yang terus dilakukan untuk mencapai target.

3.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Retribusi Jasa Umum	121.236.523,33	29.144.166,67

Penjelasan :

Pendapatan LO Berbeda dengan LRA dikarenakan adanya Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka dan adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat

3.4	Beban	Uraian	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
		<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>9.848.228.678,58</b>	<b>8.254.577.493,00</b>
		Beban Pegawai	4.957.456.704,00	4.869.641.526,00
		Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.366.372.038,00	2.340.978.725,00
		Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.591.084.666,00	2.528.662.801,00
		<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>4.166.397.756,00</b>	<b>3.384.935.967,00</b>
		Beban Barang	1.611.276.297,00	1.295.052.556,00
		Beban Jasa	2.336.754.479,00	1.878.740.811,00
		Beban Pemeliharaan	58.606.980,00	121.617.600,00
		Beban Perjalanan Dinas	112.110.000,00	89.525.000,00
		Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.650.000,00	-
		<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>724.374.218,58</b>	<b>321.868.905,60</b>
		<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>374.390.673,52</b>	<b>155.154.722,90</b>
		Beban Penyusutan Alat Besar	178.571,43	-
		Beban Penyusutan Alat Angkutan	52.464.341,77	23.732.226,62
		Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	584.000,00	292.000,00
		Beban Penyusutan Alat Pertanian	4.550.000,00	2.275.000,00
		Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	218.752.313,69	93.864.357,00
		Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.651.000,00	6.825.800,00
		Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	640.000,00	320.000,00
		Beban Penyusutan Komputer	81.337.739,43	26.775.910,68
		Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	89.250,00	-
		Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.142.857,20	1.071.428,60
		<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>109.931.918,98</b>	<b>44.314.025,65</b>
		Beban Penyusutan Bangunan Gedung	83.447.021,38	39.865.339,07
		Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	17.484.897,60	4.448.686,58
		Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	236.264.126,08	109.612.657,05
		Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	204.279.868,94	99.360.205,85
		Beban Penyusutan Bangunan Air	19.773.057,14	10.252.451,20
		Beban Penyusutan Instalasi	12.220.200,00	-
		<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>12.787.500,00</b>	<b>12.787.500,00</b>
		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.787.500,00	12.787.500,00

Penjelasan realisasi :

Beban Jasa LO berbeda dengan Belanja jasa LRA dikarenakan ada Pembayaran Utang Listrik dan Telepon Bulan Desember 2023 dan ada belanja hibah di LRA karena baru akan dikeluarkan dibulan Januari 2024. Beban Barang LO beda dengan Belanja Barang LRA dikarenakan adanya penyesuaian penerimaan dan penggunaan barang persediaan setiap bulan.

3.5	Aset	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		<b>ASET</b>	<b>8.365.337.436,84</b>	<b>7.875.435.787,28</b>
		<b>ASET LANCAR</b>	<b>873.049.000,00</b>	<b>3.336.575,00</b>
		Kas di Bendahara Pengeluaran	-	3.336.575,00
		Persediaan	873.049.000,00	3.336.575,00
		<b>ASET TETAP</b>	<b>7.492.288.436,84</b>	<b>7.859.311.712,28</b>
		<b>Tanah</b>	<b>830.139.000,00</b>	<b>830.139.000,00</b>
		<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.127.751.023,34</b>	<b>2.888.075.839,17</b>
		Alat Besar	26.441.656,90	4.543.904,90
		Alat Angkutan	622.220.611,88	597.914.244,56
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.920.000,00	2.920.000,00
		Alat Pertanian	18.200.000,00	18.200.000,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.532.150.003,41	1.513.659.016,24
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	82.097.579,40	82.397.579,40
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.200.000,00	3.200.000,00
		Alat Laboratorium	1.785.000,00	-
		Komputer	770.784.795,25	597.289.717,57
		Rambu-rambu	42.610.376,50	42.610.376,50
		Peralatan Olahraga	25.341.000,00	25.341.000,00
		<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.604.059.045,13</b>	<b>4.276.202.045,13</b>
		Bangunan Gedung	3.838.633.552,81	3.838.633.552,81
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	765.425.492,32	437.568.492,32
		Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.993.827.342,08	2.993.827.342,08
		Jalan dan Jembatan	2.044.226.710,48	2.044.226.710,48
		Bangunan Air	827.398.631,60	827.398.631,60
		Instalasi	122.202.000,00	122.202.000,00
		Aset Tetap Lainnya	186.937.441,49	187.487.441,49
		Bahan Perustakaan	10.817.441,49	10.817.441,49
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	176.120.000,00	176.670.000,00
		<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(4.250.425.415,20)</b>	<b>(3.316.419.955,59)</b>
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.219.107.509,59)	(1.945.179.338,13)
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.090.509.712,95)	(842.613.151,25)
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(764.988.192,66)	(528.627.466,21)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(175.820.000,00)	-
		<b>ASET LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>12.787.500,00</b>
		Aset Tidak Berwujud	76.725.000,00	76.725.000,00
		Aset Lain-lain	-	-
		<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(76.725.000,00)</b>	<b>(63.937.500,00)</b>

Penjelasan :

Ada penambahan aset selama Tahun 2023 dikarenakan ada Belanja Modal Laptop dan Televisi dibulan Februari 2023, Belanja Modal Komputer di bulan November 2023, dan Belanja Modal Pembuatan Pagar Pemaman dibulan Juni 2023, Ada penghapusan barang rusak hasil sensus dan Penyesuaian penerimaan dan penggunaan persediaan setiap bulan, serta adanya penyusutan pada semester 1 dan semester 2 TA 2023



3.6	Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>31,973,919.67</b>	<b>36,823,349.33</b>
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	-
	Utang PPh Pusat	-	-
	Utang PPh Pusat	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	24,740,916.67	31,082,083.33
	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	24,740,916.67	31,082,083.33
	<b>Utang Belanja</b>	<b>7,233,003.00</b>	<b>5,741,266.00</b>
	Utang Belanja Barang dan Jasa	7,233,003.00	5,741,266.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	149,559.00	168,704.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	7,083,444.00	5,572,562.00

Penjelasan :

Ada Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka yang diakui selama Tahun Anggaran 2023, dan penggunaan utang penggunaan listrik dan telepon bulan Desember 2023.

3.7	Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>EKUITAS</b>	<b>8,333,363,517.17</b>	<b>8,435,069,393.09</b>
	Ekuitas	(1,888,379,717.30)	(1,291,187,524.07)
	Ekuitas	7,838,612,437.95	7,256,114,707.86
	Surplus/Defisit-LO	(9,726,992,155.25)	(8,547,302,231.93)
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10,688,876,148.00	9,702,600,629.00
	RK PPKD	10,688,876,148.00	9,702,600,629.00
	Ekuitas Mutasi	(467,132,913.53)	23,656,288.16

Penjelasan :

Terdapat Ekuitas Mutasi sebesar Rp 68.283.439,00 terdiri dari ...

Rp	(1,715,000.00)	Jurnal Masuk Extra Belanja Modal Alat Peraga Edukasi
Rp	69,998,439.00	Pendapatan Hibah Sepeda Motor dari BPKAD
Rp	(209,962,000.00)	Pemeliharaan aset
Rp	(147,114,385.86)	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan
Rp	(175,820,000.00)	Koreksi Penyusutan Semester 2
Rp	(2,945,800.00)	Penghapusan Aset Rusak
Rp	425,833.33	Selisih Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka
Total Ekuitas Mutasi	Rp (467,132,913.53)	

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

1. Mantri Pamong Praja;	AFFRIO SUNARNO, S.Sos.
2. Mantri Anom ;	ENI PURWATI, S.SIP., M.Si.
Sekretariat terdiri dari :	
a. Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	DIAN RATNAWATI, S.E.
b. Ka Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.	MAYA PUSPTA SARI, S.E.
3. Jawatan Praja;	SONI HAKSOMO, S.E., M.Si.
4. Jawatan Keamanan;	SONI HAKSOMO, S.E., M.Si. (plt. Ka. Jawatan Keamanan)
5. Jawatan Kecalakmuran;	BAYU ASTUTI, S.A.P.
6. Jawatan Sosial	Dra. ILASARI TIAHAYANI DEWI, MLM.
7. Jawatan Umum	DEWI UTAMI PRATAMARINI, S.I.P., M.Si.
8. Kelompok Jabatan Fungsional	
9. Kelurahan	
Lurah Gedongkiwo	RINA BUDI PRASTIWI, S.I.P., M.Si.
Lurah Suryodiningrat	RIYAN WULANDARI, S.SIP., M.I.P.
Lurah Mantrijeron	BAMBANG PURAMBONO, S.E.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tupoksi Kemantren

(Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan)

1. Kedudukan

Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan tugas pembantuan serta penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

3. Fungsi

Kemantren mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan
- pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Bab V  
Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 33.045.000,00 atau 122,39% dari target Rp 27.000.000,00 yang terdiri dari :

- 1) Hasil Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat sebesar Rp 33.045.000,00 atau 122,39% dari target;
- 5.1.2 **Belanja**  
Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.721.921.148,00 atau 97,22% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.
- 5.1.2.a **Belanja Operasi**  
Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 9.992.073.148,00 atau sebesar 97,04% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.  
Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 5.220.660.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.957.456.704,00 atau 94,96% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 4.187.936.578,00 terealisasi sebesar Rp 4.161.569.444,00 atau sebesar 99,37% dari anggaran.
- 5.1.2.b **Belanja Modal**  
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 729.846.000,00 atau 99,80% dari anggaran.  
Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.
- 5.2 **Neraca**
- 5.2.1 **Aset**  
Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 8.365.337.436,84 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 873.049.000,00, Aset Tetap sebesar Rp 7.492.288.436,84 dan Aset Lainnya sebesar Rp 0.
- 5.2.2 **Kewajiban**  
Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 31.973.919,67 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
- 5.2.3 **Ekuitas**  
Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 8.333.363.517,17
- 5.3 **Laporan Operasional**
- 5.3.1 **Pendapatan-LO**  
Jumlah Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp 121.236.523,33 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 38.960.333,33 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 82.276.190,00
- 5.3.2 **Beban-LO**  
Jumlah Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp 9.848.228.678,58 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 9.848.228.678,58 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp 724.374.218,58
- 5.3.3 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**  
Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar (Rp)9.726.992.155,25
- 5.4 **Laporan Perubahan Ekuitas**
- 5.4.1 **Ekuitas Awal**  
Ekuitas awal sebesar Rp 7.838.612.437,95 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.
- 5.4.2 **Surplus/Defisit LO**  
Surplus/Defisit LO Tahun 2023 sebesar (Rp)9.726.992.155,25 merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan Tahun 2023.
- 5.4.3 **Ekuitas Mutasi**  
Ekuitas Mutasi sebesar (Rp)467.132.913,53 terdiri dari ...
- |                |                     |  |
|----------------|---------------------|--|
| Rp             | (1.715.000,00)      | Jurnal Masuk Extra Belanja Modal Alat Peraga Edukasi |
| Rp             | 60.998.439,00       | Pendapatan Hibah Sepeda Motor dari BPKAD             |
| Rp             | (209.962.000,00)    | Pemeliharaan aset                                    |
| Rp             | (147.114.385,86)    | Penyesuaian Akumulasi Penyusutan                     |
| Rp             | (175.820.000,00)    | Koreksi Penyusutan Semester 2                        |
| Rp             | (2.945.800,00)      | Penghapusan Aset Rusak                               |
| Rp             | 425.833,33          | Selisih Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka           |
| Total          |                     |  |
| Ekuitas Mutasi | Rp (467.132.913,53) |  |
- 5.4.4 **Ekuitas Akhir**  
Ekuitas akhir sebesar Rp 8.333.363.517,17 merupakan ekuitas Tahun Anggaran 2023.

